



Munich Personal RePEc Archive

# **Pancasila Economic and the Challenges of Globalization and Free Market In Indonesia**

Jaelani, Aan

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

15 March 2016

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70279/>

MPRA Paper No. 70279, posted 25 Mar 2016 06:46 UTC

# **Pancasila, Globalisasi dan Pasar Bebas: Meneguhkan Kembali Ekonomi Pancasila sebagai Karakter Bangsa**

**Aan Jaelani**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132  
Website: <http://orcid.org/0000-0003-2593-7134>;  
Email: [aan\\_jaelani@syekhnurjati.ac.id](mailto:aan_jaelani@syekhnurjati.ac.id)

## **Abstract**

*The crisis of economy in Indonesia forces the government to reform its economic development paradigm. The new paradigm development refers to great attention of economic-societies such as cooperation. Those involve in the planning of national economic development as well as the planning of society development. This article aims to define the combination between Islamic economic and economic of Pancasila to pressure the identity of Indonesian state in glabalization era.*

**Kata Kunci:** *ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, globalisasi, pasar bebas*

## **Pendahuluan**

Perbincangan tentang “mekanisme pasar” dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari paradigma ”ekonomi pasar” seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.<sup>1</sup> Pada sisi lain, ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain ”serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.<sup>2</sup>

Fakta empirik menunjukkan bahwa sesungguhnya perekonomian pasar jauh dari sempurna, dimana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber, dan terkadang untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan biaya yang

---

<sup>1</sup> N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 11.

<sup>2</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

tinggi, ditambah keberadaan skala ekonomi diberbagai sektor utama perekonomian menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha yang ingin berusaha pada sektor yang sama.

Pada gilirannya hal diatas mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat, dan hal ini merupakan yang tidak diharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka mulai menerapkan ekonomi pasar di negara mereka, ternyata yang didapatkan oleh mereka justru ketidaksempurnaan pasar (*imperfect market*), yang justru membawa mereka "terjebak" dalam keterbelakangan ekonomi.

Ekonomi kapitalis<sup>3</sup> melihat pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Adapun sistem ekonomi sosialis<sup>4</sup> menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat.

Pandangan kapitalisme dan sosialisme tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa manusia pada satu sisi memiliki kebebasan untuk bertindak secara ekonomi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, sedangkan pada sisi lain manusia sama sekali diposisikan sebagai robot yang tidak mampu berkreasi dan menuruti apa saja yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya terkait dengan mekanisme pasar. Dua paradigma ekonomi dunia ini kemudian memberikan dampak yang semakin besar terhadap perekonomian bangsa yang kian terpuruk terutama pada negara-negara berkembang.

Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, ekonomi Islam menilai bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, namun demikian nilai-nilai etika menjadi dasar pertimbangan dalam setiap transaksi dan pelaku bisnis. Meskipun demikian, etika bisnis yang berdasarkan nilai-nilai budaya maupun agama sangat sulit diwujudkan dalam prakteknya.

Setiap pelaku bisnis terjebak pada arus globalisasi dengan *mindset* kebebasan individu yang menandai munculnya era pasar bebas (*free market-based*) dan persaingan (*competition-based*) sebagai bentuk neoliberalisme. Maka persoalan lain

---

<sup>3</sup> Baca Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966).

<sup>4</sup> Buku Karl Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

muncul terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang diabaikan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Mengapa kita mengabaikan ekonomi berdasarkan kerjasama (*cooperation-based economics*), yang justru memelihara keberadaan setiap kekuatan ekonomi, tidak saling melumpuhkan (*disempowering*), bahkan saling bekerja sama ke arah membentuk kekuatan bersama (*macht-vorming*) secara sinergis ?

Tulisan ini dengan memadukan ekonomi Islam dan ekonomi pancasila akan mencoba menguraikan perubahan mendasar yang terjadi pada bidang ekonomi terutama setelah pasca reformasi yang begitu saja meninggalkan identitas kebangsaannya, yaitu Pancasila yang tidak dijadikan sebagai sumber nilai dalam menjalankan roda perekonomian (Pasal 33 UUD 1945). Hal ini yang menyebabkan keterpurukan ekonomi bukan hanya pada aspek material yang memang sedang kita alami, bahkan budaya kita yang terjebak pada *mindset* neoliberalisme dengan ciri khas individualisme, persaingan, dan pasar bebas.

### **Tela'ah Pustaka Globalisasi, Pasar Bebas, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia**

Dalam kajian ekonomi pasar, keberadaan negara dengan peran yang dilakukannya menjadi perdebatan, apakah perlu ikut campur atau melepaskan mekanisme pasar yang berlangsung khususnya dalam hal pengawasan dan pengaturan harga. Meskipun demikian, negara memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi terutama 3 fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Beberapa kajian literatur tentang globalisasi dan mekanisme pasar antara lain dapat dicatat karya Adam Smith,<sup>5</sup> *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Tokoh ini sebagai pelopor dalam kapitalisme yang memunculkan paradigma *laissez-faire* atau pasar bebas. Paul A. Samuelson<sup>6</sup> dalam *Economics*. Karya ini menjadi buku penting dalam kajian ilmu ekonomi yang membawa tradisi liberalisme dan pasar bebas. Karena itu, Sri-Edi Swasono memberikan kritik terhadap budaya kampus yang menggunakan literatur ini tanpa kritik mendalam karena aksioma-aksioma liberalisme dan individualismenya.

Karya lain ditulis Robin W. Boadway and Neil Bruce<sup>7</sup> dalam *Welfare Economics*. Buku ini memberikan penjelasan tentang paradigma kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966)

<sup>6</sup> Paul A. Samuelson, *Economics* (New York: McGraw-Hill Book Company, 2008).

<sup>7</sup> Robin W. Boadway and Neil Bruce, *Welfare Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1984).

ekonomi dalam perspektif kapitalisme. Alessandro Roncaglia<sup>8</sup> dalam *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought* memberikan penjelasan dengan analisis ekonomi tentang perkembangan pemikiran ekonomi klasik sampai neoliberalisme. Tulisan lain tentang hubungan negara dan pasar dapat dibaca Murray N. Rothbard<sup>9</sup> dalam *Power and Market Government and the Economy*. Buku ini penting untuk melihat dimensi peran dan pergulatan kekuatan pemerintah dan pasar dalam ekonomi. I. Wallerstein<sup>10</sup> dalam *The Capitalist World-Economy* mengungkapkan secara panjang sejarah kapitalisme dan globalisasi yang bergerak secara cepat di dunia modern.

Buku lain ditulis Susan George<sup>11</sup> dalam *Republik Pasar Bebas* yang memaparkan betapa sengitnya perang ide dan perang ideologi ekonomi pasar dalam menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global. Shinichi Ichimura, et. al (eds.)<sup>12</sup> dalam *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* menggambarkan pula kemenangan kapitalisme atas sosialisme.

Sedangkan kritik atas globalisasi dan pasar bebas antara lain karya Sri-Edi Swasono,<sup>13</sup> *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2010 dan *Mewaspadaai Pasar Bebas (dalam Dari Lengser ke Lengser)*. Tokoh ekonomi rakyat ini banyak menghasilkan karya yang mengkritik globalisasi, pasar bebas, neoliberalisme dan fokus pada memperjuangkan demokrasi ekonomi berbasis Pancasila. Rainer Adam, dkk.<sup>14</sup> dalam *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* memaparkan kondisi ekonomi Indonesia di tengah arus pasar bebas.

Tokoh lain adalah Mubyarto<sup>15</sup> yang menulis *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Karya ini cukup penting bukan hanya upaya akademik penulis dalam mengkritik kapitalisme melainkan juga bentuk

---

<sup>8</sup> Alessandro Roncaglia, *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought* (New York: Cambridge University Press, 2006).

<sup>9</sup> Murray N. Rothbard, *Power and Market Government and the Economy* (Kansas: Institute for Humane Studies, Inc., 1977).

<sup>10</sup> I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (New York: Cambridge University Press, 1979)

<sup>11</sup> Susan George, *Republik Pasar Bebas* (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwisata, 2002).

<sup>12</sup> Shinichi Ichimura, et. al (eds.), *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* (New York; Palgrave Macmillan, 2009)

<sup>13</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2010.

<sup>14</sup> Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004), 43.

<sup>15</sup> Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

perjuangan dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Kemudian Indra Ismawan<sup>16</sup> dalam *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*. Buku ini memaparkan kiat-kiat koperasi dan perusahaan kecil-menengah dalam menghadapi era ekonomi liberal. Mahmud Thoha, dkk.,<sup>17</sup> dalam *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan* memberikan analisis krisis ekonomi di Indonesia akibat globalisasi dan memberikan alternatif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

### **Globalisasi Ekonomi dan Karakteristik Pasar Bebas**

Pelaksanaan peran negara dalam mengintervensi pasar dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik ekonomi yang dijalankannya.<sup>18</sup> Kenyataannya, pasar dan mekanisme pasar bukan "segala-galanya", atau "invisible hand" yang selalu mampu mengendalikan kekacauan pasar ke arah keseimbangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ekonom kelembagaan (*institutional economist*).<sup>19</sup>

Dalam sejarah ekonomi Islam, adanya mekanisme pasar dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a., terkait adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW. tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar secara alamiah. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Dalam analisis ekonom Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Adam Smith, dengan teorinya, *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).<sup>20</sup> Dalam hal ini, para pelaku pasar yang menentukan harga, sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran, serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama.

---

<sup>16</sup> Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah* (Jakarta: Gramedia, 2001).

<sup>17</sup> Mahmud Thoha, dkk., *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002).

<sup>18</sup> A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, terj. Anshari Thayyib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 104-108.

<sup>19</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE-, 2000), 100.

<sup>20</sup> Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: TIII, 2003), 76. Baca pula Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis* (Jeddah: Scientific Publishing Centre, KAAU, 2005).

Mekanisme pasar merupakan cara bekerjanya pasar, berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Sistem pasar yang berkembang sekarang ini adalah sistem pasar bebas, yaitu sistem pasar yang menggunakan prinsip *laissez faire*.<sup>21</sup> Hasil atau equilibrium dari mekanisme pasar adalah bergantung pada struktur pasar yang ada, atau, dengan kata lain, tergantung pada susunan atau bangunan dari pasar.

Kegiatan pasar yang dikenal dengan perdagangan pada dekade terakhir ini terfokus pada persoalan perdagangan bebas atau “bisnis internasional”, yaitu bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara.<sup>22</sup> Perdagangan bebas yang menjadi isu globalisasi tidak memperhatikan varian situasi ekonomi suatu negara, terutama negara di Dunia Ketiga yang ikut terimbas. Hal ini sebagaimana ditegaskan Albert Bergesen, disebabkan oleh sistem pasar bebas yang diberlakukan secara paksa sepenuhnya sebagai hukum baru dalam mengatur tata perekonomian internasional (global).<sup>23</sup> Konsekuensinya, setiap negara dituntut untuk mempersiapkan banyak hal, mulai kehandalan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur ekonomi, *natural resources*, maupun pranata hukum untuk menjamin kepastian berbisnis.

Akibat lain dari mekanisme pasar pada bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas (*free market*) berupa adanya upaya liberalisasi ekonomi dan privatisasi atau swastanisasi sebagai konsekuensi dari ekspansi modal atau kapital yang disebar oleh negara-negara maju ke seluruh dunia. Setiap negara akan mengalami perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk diselaraskan dengan kepentingan global, serta pada saat yang bersamaan, terjadi liberalisasi ekonomi sesuai semangat globalisasi.<sup>24</sup>

Karena itu, inti dari mekanisme pasar bebas adalah; *pertama*, adanya *market access*, yaitu akses terhadap pasar dibuka seluas-luasnya sampai tidak adalagi pembatasan dan halangan setiap pelaku ekonomi untuk keluar masuk tapal batas negara anggota OPD (Organisasi Perdagangan Dunia) atau WTO (*World Trade Organization*); dan *kedua*, *national treatment* atau perlakuan nasional yang memberikan perlakuan secara adil kepada setiap pelaku ekonomi yang berkiprah di

---

<sup>21</sup> Lihat Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2006), 53-76, dan Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 130-156.

<sup>22</sup> Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad (ed.), *Islamic Finance and Economic Development* (New York: Palgrave MacMillan, 2005), 202-214.

<sup>23</sup> Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar* (Jakarta: Nurinsani, 2003), 13-29.

<sup>24</sup> I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (New York: Cambridge University Press, 1979), 91.

negara tuan rumah, sebagaimana halnya perlakuan yang diberikan kepada pelaku ekonomi nasional atau dalam negeri.<sup>25</sup>

Berbagai persoalan dapat muncul akibat perdagangan bebas karena kemungkinan untuk mewujudkan harapan tersebut adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terwujud. Umar Chapra<sup>26</sup> memberikan alasan bahwa ada beberapa distorsi dalam mengekspresikan prioritas di dalam pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya bias dalam merealisasikan efisiensi dan keadilan. Munculnya distorsi dalam mengekspresikan prioritas dalam sistem pasar diakibatkan ketidaksukaan ekonomi konvensional pada penilaian normatif dan tekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan, memuaskan keinginan serta melayani kebutuhan pribadi jelas merupakan penyimpangan falsafah dasar dari sebagian besar agama. Agama-agama ini secara umum yakin bahwa kesejahteraan material, meski penting, tidak cukup bagi kesejahteraan manusia.

### **Pasar dalam Perspektif Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam**

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh *capital* atau modal, dengan *profit motive* (motif keuntungan) dimana uang adalah segalanya. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga dikenal adanya kebebasan dalam berekonomi, beserta instrumen bunga yang kental. Beberapa karakteristik dari ekonomi kapitalis adalah *individual actions* (tindakan individu) dengan tidak adanya perencanaan ekonomi yang tersentralisasi.<sup>27</sup>

Sementara sosialisme dimana tidak adanya kepemilikan pribadi, yang ada hanyalah kepemilikan publik, keberadaan industri serta faktor produksi sepenuhnya untuk kepentingan sosial serta adanya *social service motive*. Beberapa karakteristik dari ekonomi sosialis adalah *central planning of the economy* (ekonomi dengan perencanaan terpusat), berlakunya distribusi pendapatan secara merata dan aset-aset penting dimiliki oleh publik.<sup>28</sup> Marxisme adalah salah satu bentuk komunisme dimana konsumsi dan produksi diatur secara kolektif yang menekankan pada program sosial

---

<sup>25</sup> Shackle, G.L.S, *Epistemics and Economics* (Cambridge, Eng: Cambridge University Press, 1972), 104.

<sup>26</sup> Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (SEBI: 2001), 38.

<sup>27</sup> Schumpeter, J.A., *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper & Row, 1950), 65-78.

<sup>28</sup> Rostows, W., *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), 36-37..



dan pendidikan, serta bersumber pada ilmu pengetahuan dan meniadakan Tuhan. Sehingga dalam praktiknya menghalalkan segala cara untuk kebahagiaan kolektif.<sup>29</sup>

Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Sedangkan dalam paradigma sosialis, pasar harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.<sup>30</sup>

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain.<sup>31</sup> Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.

Mekanisme pasar banyak dikaji dalam pemikiran sarjana Muslim klasik. Abu Yusuf menguraikan hukum *supply and demand* dalam perekonomian dengan teori “bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.”<sup>32</sup> Ibnu Taymiyah<sup>33</sup> menjelaskan bahwa di dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Namun, Ibnu Taymiyah menentang pula adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

---

<sup>29</sup> Gottlieb, M., *A Theory of Economic Systems* (New York NY: Academic Press. Inc., 1984), 23-25.

<sup>30</sup> Baca teori kesejahteraan ekonomi pada karya Robin W. Boadway and Neil Bruce, *Welfare Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1984).

<sup>31</sup> Mahmud Shaikh Ahmad, *Economics of Islam: A Comparative Study* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1995), 34-35.

<sup>32</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1979), 80. Baca pula Dia’u al-Din Al-Rayyis, *Al-Kharaj and the Financial Institutions of the Islamic Empire* (Cairo: the Anglo Egyptian Library, 1961), 23-27.

<sup>33</sup> Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), 2. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

Dalam pandangan al-Ghazali,<sup>34</sup> peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Terkait dengan mekanisme pasar Ibnu Khaldun memberikan analisis tentang “harga-harga di kota”. Menurutnya, jenis barang dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, barang kebutuhan pokok, *kedua* barang mewah. Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.<sup>35</sup>

### **Kegagalan Pasar dan Politik Ekonomi Negara**

Menurut Samuelson,<sup>36</sup> pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam (1) pertumbuhan pengeluaran pemerintah; (2) pemerataan pendapatan oleh negara; dan (3) pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi: (1) pengawasan langsung; (2) konsumsi sosial dari barang publik; (3) stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter; (4) produksi pemerintah; dan (5) pengeluaran kesejahteraan.

Dalam mekanismenya, pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara sempurna, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan pasar tersebut, seperti diungkapkan Murray N. Rothbard,<sup>37</sup> biasanya disebabkan oleh adanya *common goods* atau barang bersama, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik dan eksternalitas, pasar tidak lengkap (*incomplete market*), keterbatasan atau kegagalan informasi, *unemployment* atau pengangguran, dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*).

Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian,<sup>38</sup> yaitu pencapaian *al-maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan shari'ah).<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), vol. II, 135

<sup>35</sup> Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, Penerjemah: F. Rosenthal (New York: Princeton, 1967), vol. II, 271-278.

<sup>36</sup> Robert J. Samuelson, “Pure Theory of Public Expenditure and Taxation”, pada karya J. Margolis & H. Guitton (eds.), *Public Economics* (New York: St. Martin Press, 1969), 98-123. Baca pula Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000), 45-59.

<sup>37</sup> Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, *an Outline of the History of Economic Thought* (New York: Oxford University Press, 2005), 111-121.

<sup>38</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 94.

Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan *al-maqashid al-shari'ah*. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci.

Demikian pula dalam ekonomi Pancasila, dimensi keadilan, persamaan hak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Cabang-cabang produksi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak (Pasal 23 UUD 1945).

Sebagai contoh, selama 32 tahun Orde Baru, feodalisme, paternalisme dan absolutisme yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan kecenderungan ke arah sentralisisme. Dalam kecendrungan semacam itu, otonomi, desentralisasi dan dekonsentrasi tidak akan berjalan.<sup>40</sup>

Untuk mempercepat pembangunan daerah, agenda utama dari era reformasi adalah otonomi daerah dan demokratisasi ekonomi. Tema sentral dari kebijaksanaan pembangunan dalam era reformasi adalah mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan rakyat sebagai pelaku pembangunan dan menempatkan ekonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena masyarakat sendiri tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan ekonomi dan sosial, maka untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin diperlukan pemberdayaan awal (*self empowerment*) dari pihak luar terutama dari pemerintah. Bahkan, menurut Sri-Edi Swasono,<sup>41</sup> rakyat telah mengalami proses pemiskinan (*impoverishment*) dan pelumpuhan (*disempowerment*), yang terjadi seiring dengan pembangunan nasional yang mengabaikan orientasi kerakyatan.

Permasalahannya sistem perdagangan bebas di era global ini bisa menjadi suatu alternatif bagi kemajuan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan, atau sebaliknya, justru ia menjadi persoalan baru bagi negara-negara

---

<sup>39</sup> Baca Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 1975), vol. 2, 6-7.

<sup>40</sup> Sri-Edi Swasono, *Mendesak: Reformasi Peranan Daerah (dalam Dari Lengser ke Lengser)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.

<sup>41</sup> Sri-Edi Swasono, *Restrukturisasi, Keadilan Sosial dan Gobalisasi*, Ceramah pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Batam 29 Maret 2001.

tertentu, khususnya negara berkembang yang terpuruk kondisi ekonominya, termasuk pula Indonesia. Di samping itu, sistem ini dapat berlaku atau tidak bagi semua dan untuk kemakmuran bersama.

Dalam ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Kegiatan ekonomi bergerak menuju pasar bebas. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi.<sup>42</sup> Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan sebagai kewajiban negara. Bagi Ibnu Taymiyah,<sup>43</sup> seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya.

Dalam ekonomi Pancasila, secara jelas ditegaskan tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Karena itu, negara Indonesia berkewajiban turut serta dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, yang semata-mata bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan menjadi identitas kebangsaan yang harus diperjuangkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, menurut Sri-Edi Swasono,<sup>44</sup> pasar bebas atau perdagangan bebas tidak memperoleh tempat dalam ekonomi Indonesia, sebab berdasarkan "daulat pasar" bukan "daulat rakyat".

Pasar bebas pada prinsipnya lebih mementingkan sekelompok orang pemilik modal yang terus menanamkan cengkeraman ekonominya pada setiap kegiatan ekonomi. Karena itu, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang ASEAN

---

<sup>42</sup>Muh. al-Assal dan Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999), 101-102. Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Mewaspada Pasar Bebas (dalam Dari Lengser ke Lengser)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.

<sup>43</sup> Ibn Taymiyah, *al-H{isbah fi al-Islam*, 20-22.

<sup>44</sup> Sri-Edi Swasono, "Pancasila, Humanisme, Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme, Menolak Liberalisme", *Orasi Ilmiah*, Universitas Pasundan Bandung, 19 Juli 2011.

Charter perlu dikritisi sebab berpihak pada kecenderungan pasar bebas yang diberlakukan di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia.<sup>45</sup> Jika tidak, bagaimana dengan rakyat kita yang miskin, miskin ekonomi dan miskin sumber daya.

### **Transformasi Pasar Islami dalam Meneguhkan Ekonomi Kerakyatan**

Dalam al-Qur'an dan hadits dapat ditemukan beberapa istilah yang menunjukkan makna "pasar" atau "perdagangan" secara umum, seperti "*al-bai'*", "*al-tijarah*" dan "*isyatara*" dengan berbagai bentuk derivasinya. Istilah tersebut mengandung makna yang beragam. Dalam konteks pasar bebas, maka jual beli atau perdagangan yang berintikan adanya pertukaran barang atau jasa mengandung unsur kebebasan pada setiap transaksinya, namun tercatat secara administratif dengan baik. Dalam hal ini, kebebasan transaksi ataupun jenis barang yang dijadikan komoditi pada perdagangan bebas dilandasi oleh nilai-nilai etis-religius. Di samping itu, para pelaku bisnis tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur ribawi.

Ekonomi Islam tetap konsisten memotong segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun tidak alami lagi. Karena itu, Islam melarang *ihthikar* (penumpukkan barang, agar langka dan harga naik), *mengharamkan* talaqi rukban (memborong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar), *tala'ub bi al-tsaman* (mempermainkan harga), *taghrir* (menipu dalam jual-beli), *riba*, *najs* (calo, pura-pura menawar untuk menipu pembeli agar membayar dengan harga yang lebih tinggi), *tashriyah* (tidak memerah susu binatang agar dianggap selalu bersusu banyak), dan sebagainya. Jadi, segala tindakan negatif, baik oleh penjual maupun pembeli yang menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik-turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan dalam praktek ekonomi Islam.

Jika demikian, pasar bebas harus dapat dikendalikan agar terjamin kesetimbangan sosial. Kualitas kesetimbangan ini akan mengendalikan semua segi tindakan manusia – sebagai faktor terpenting atas perilaku ekonomi. Hal ini dapat dianalisis; *pertama*, hubungan dasar antara konsumsi, produksi, dan distribusi akan berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang (monopoli yang eksploitatif); *kedua*,

---

<sup>45</sup> Lebih lanjut baca *Judicial Review Testimoni Sri-Edi Swasono terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter* di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi RI, 22 Juli 2011.

keadaan perekonomian yang dipengaruhi pola perdagangan bebas harus konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata serta tidak semakin menyempit (QS. 59:7).<sup>46</sup> Dalam hal ini, Islam melarang pula penimbunan kekayaan (QS. 4:37), sekaligus melarang konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak (QS. 2:195).

Perkembangan ekonomi global sekarang ini memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negara-bangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi-organisasi independen, masyarakat madani, badan-badan supra-nasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mishra (2000) dalam bukunya *Globalization and Welfare State* menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Namun demikian, analisis Edi Suharto,<sup>47</sup> pada banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan ‘penyesuaian struktural’ (*structural adjustment*) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal.

Karena demikian, pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral, terutama aspek perdagangan yang menjadi sumber devisa negara. Perdagangan, dalam konteks syari’ah dan budaya Pancasila, menjadi bagian yang tak

---

<sup>46</sup> Baca Haider Naqvi, *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 34-68.

<sup>47</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 48.

terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermu'amalah. Hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku bisnis, sehingga perdagangan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat–amal–tujuan perdagangan. Realitas inilah yang mendasari perdagangan bebas harus dikonsepsikan dari epistemologi tauhidi, yaitu Allah sebagai Realitas Absolut, yang mencakup prinsip-prinsip:<sup>48</sup>*tauhid* (QS. 41:53, 12:40, 6:162), *rububiyah*, *khilafah* (QS. 2:30, 35:39), *tazkiyah*, dan *akuntabilitas* (QS. 4:85, 10:108).

Dalam era pasar bebas, kegiatan ekonomi yang dilakukan bisa saja tidak memperhatikan masalah etika yang dapat mengakibatkan sesama pelaku ekonomi akan bertabrakan kepentingannya, sehingga kondisi ini bisa jadi menciptakan kekuatan yang dapat menghancurkan pelaku ekonomi lain. Karena itu, etika bisnis Islam menjadi kerangka acuan sebagai bentuk moralitas pelaku ekonomi. Etika bisnis ini dapat mencegah terjadinya distorsi pasar, sehingga berbagai bentuk larangan praktek ekonomi memberikan mashlahah bagi kehidupan manusia secara utuh.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diungkapkan Sri-Edi Swasono,<sup>49</sup> ada enam keprihatinan nasional seiring dengan perkembangan globalisasi yang mempengaruhi rakyat Indonesia melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

*Pertama*, mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini mengusur orang miskin dan bukan mengusur kemiskinan ? akibatnya pembangunan menjadi proses dehumanisasi.

*Kedua*, mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia ? orang asing yang membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sedang orang Indonesia menjadi penonton atau pelayan globalisasi.

*Ketiga*, mengapa “daulat pasar” dibiarkan begitu berkuasa, sehingga mengusur “daulat rakyat”.

*Keempat*, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di negeri sendiri, menjadi “*the master in our own homeland, not just to become the host*”, yang hanya melayani

---

<sup>48</sup>Ahmad Khurshid (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980), 178-179.

<sup>49</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brithershood* (Jakarta: UNJ Press, 2005), 234-238.

kebutuhan globalisasi dan kepentingan mancanegara ?jadi, mengapa kita tetap menjadi *kuli* di negeri sendiri, sekedar menjadi *master of ceremony* ? akibatnya GDP berkembang lebih cepat dari GNP. Banyak ekonom lengah akan hal ini.

*Kelima*, kesejahteraan rakyat tak kunjung tercapai, kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat.

*Keenam*, kesenjangan antara kaya dan miskin yang membentuk *frustation-gap* pada pihak si miskin, yaitu *gap* antara aspirasi yang berkembang oleh dorongan iklan konsumtif mewah dan makin meluasnya tarikan *affluency* pihak yang kaya dengan segala absurditas yang telah menyertainya, telah mendorong ketimpangan struktural dalam pemilikan.

Oleh karena itu, kehidupan ekonomi Indonesia seharusnya menetapkan berlakunya “demokrasi ekonomi” (Pasal 33 UUD 1945) sebagai penolakan terhadap liberalisme ekonomi melalui pasar bebas. Demokrasi ekonomi Indonesia menegaskan hubungan ekonomi berdasarkan *mutualism and brotherhood* (kebersamaan dan asas kekeluargaan) menolak *laissez-faire* atau pasar bebas neoliberalistik. Dalam wujudnya, demokrasi ekonomi ini meneguhkan kembali ekonomi rakyat.

### **Pancasila dan Makna Strategis Ekonomi Rakyat dalam Pembangunan**

Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia memberikan pandangan bahwa demokrasi ekonomi memiliki prinsip-prinsip partisipasi, emansipasi, dan keterbawasertaan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi harus senantiasa membawa rakyat agar teremansipasi. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Tidak seharusnya terjadi eksklusivisme pembangunan, tidak terjadi pula marginalisasi, alienasi atau penyingkiran terhadap rakyat miskin dan lemah.

Peran ekonomi rakyat perlu ditempatkan sebagai strategi pembangunan. Makna strategis ekonomi rakyat dalam pembangunan antara lain: (1) rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan; (2) memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk *human investment*



(bukan pemborosan atau *inefficiency*) serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grass-roots*; dan (3) pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self-empowering*).

Dengan demikian, Pancasila harus ditempatkan sebagai pijakan pemerintah Indonesia dalam menyusun “paradigma baru” melalui kebijaksanaan ekonomi yang mencerminkan demokrasi ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi tercermin dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Impelementasi konkret dari demokrasi Pancasila ini adalah gerakan koperasi dengan konsep “*triple-co*” yang mencakup pemilikan bersama (*co-ownership*), penentuan bersama (*co-determination*) dan tanggung jawab bersama (*co-responsibility*).<sup>50</sup> Di beberapa negara koperasi banyak tumbuh menjadi usaha yang maju dengan *income* yang besar pula.

## Penutup

Pembangunan ekonomi Indonesia di tengah arus globalisasi semestinya mendasarkan diri pada demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai identitas kebangsaan, yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi negara dan rakyatnya, kepentingan negara dan kepentingan rakyat lebih diutamakan. Demokrasi ekonomi sebagai nilai-nilai kemerdekaan menempatkan posisi rakyat sebagai “sentral-substansial” dengan musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme untuk saling mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini akan secara tegas menolak ekonomi liberal kapitalistik dengan pasar bebasnya yang menempatkan modal sebagai yang sentral-substansial dan mereduksi posisi rakyat menjadi yang “marginal-residual”, mewajarkan eksploitasi dan mekanisme ekonomi yang ribawi.

---

<sup>50</sup> Konsep *triple-co* berarti usaha-usaha besar dapat dimiliki oleh usaha-usaha kecil (atau koperasi) “terkait”, baik karena keterkaitan konsumsi (*consumption common bond*), keterkaitan produksi (*production common bond*) maupun keterkaitan teritori (*teritory common bond*). Yang kecil, menengah dan yang besar terintegrasi secara konsolidatif membentuk kekuatan ekonomi nasional yang tangguh untuk menghadapi globalisasi dan kekuatan global. Lebih lanjut baca Sri-Edi Swasono, *Restrukturisasi, Keadilan Sosial dan Gobalisasi*, Ceramah pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Batam 29 Maret 2001).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979.
- Adam, Rainer, dkk. *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2006.
- Ahmad, Khurshid (ed.). *Studies in Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980.
- Ahmad, Mustaq. *Business Ethics in Islam*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 2001.
- Al-Assal, A. Muhammad.dan Fathi Abd. Karim. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cairo: al-Maktabah al-Tijanyah al-Kubra, 1975.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* . New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Boadway, Robin W. dan Neil Bruce. *Welfare Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
- Essid, Yassine. *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*. Leiden: E.J. Brill, 1995.
- George, Susan, *Republik Pasar Bebas*, Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwisata, 2002.
- Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar*, Jakarta: Nurinsani, 2003.
- Ibn Khaldun. *al-Muqaddimah Ibn Khaldun*. Cairo: Dar Ibn al-Haitham, 2005/1426.
- Ibn Taymiyah. *al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Ibn Taymiyah. *al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'iy wa-al-Ra'iyah*. Saudi Arabia: Dar 'alam al-Fawa'id, t.t.
- Ichimura, Shinichi, et. Al. (eds.). *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience*. New York; Palgrave Macmillan, 2009.

- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
- Ismawan, Indra, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Mishra, Ramesh. *Globalization and the Welfare State*. London: McMillan, 2000.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Naqvi, Haider. *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation, 1981.
- Roncaglia, Alessandro. *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Rostows, W. *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Rothbard, Murray N., *Power and Market Government and the Economy*, Kansas: Institute for Humane Studies, Inc., 1977.
- Samuelson, Paul A., *Economics*, New York: McGraw-Hill Book Company, 2008.
- Schumpeter, J.A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Row, 1950.
- Siddiqui, M.N. *Role of the State in the Economy:-An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, UK., 1996.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. (New Rochelle, N.Y : Arlington House, 1966.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2010.
- Swasono, Sri-Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brithershood*, Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, *Mewaspadaai Pasar Bebas (dalam Dari Lengser ke Lengser)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.

- Swasono, Sri-Edi, “Pancasila, Humanisme, Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme, Menolak Liberalisme”, *Orasi Ilmiah*, Universitas Pasundan Bandung, 19 Juli 2011.
- Swasono, Sri Edi, *Judicial Review Testimoni Sri-Edi Swasono terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter*, Mahkamah Konstitusi RI, 22 Juli 2011
- Thoha, Mahmud, dkk., *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* . Jakarta: Erlangga, 2003.
- Umar Chapra, M. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Wallerstein, I. *The Capitalist World-Economy*. New York: Cambridge University Press, 1979.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.